

UPAYA JAKSA DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN 8/PID.SUS- TPK/2025/PT.TPG)

**Oleh
Wanda Hafisyah
NIM. 2105040003**

Abstrak

Tindak pidana korupsi yakni kejahatan luar biasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara, sehingga upaya pemulihan kerugian negara menjadi aspek penting dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya jaksa dalam mengembalikan kerugian negara pada tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaannya. Metode penelitian ini yakni penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data didapatkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Penerapan pidana uang pengganti tersebut mencerminkan orientasi pemidanaan yakni dengan mengembalikan kerugian negara sebagai akibat langsung dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemulihan kerugian negara, antara lain berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai besaran kerugian negara, keterbatasan kemampuan terpidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, serta proses penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana yang memerlukan waktu dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi pengembalian kerugian negara secara cepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penelusuran aset, konsistensi penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim, serta sinergi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan lembaga auditor negara guna menjamin terwujudnya pemulihan kerugian negara secara maksimal dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Jaksa, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

***PROSECUTORS' EFFORTS TO RECOVER STATE LOSSES IN
CORRUPTION CRIMES (STUDY OF DECISION 8/PID.SUS-
TPK/2025/PT.TPG)***

By
Wanda Hafisya
NIM. 2105040003

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that causes financial losses to the state, making efforts to recover state losses an important aspect of law enforcement. This study aims to analyze prosecutors' efforts to recover state losses in corruption cases and the obstacles faced in their implementation. The research method used is empirical legal research using a sociological approach to law. Data was obtained through literature studies and interviews with relevant parties, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the panel of judges has imposed additional penalties in the form of compensation payments to the defendants as an effort to recover state financial losses caused by corruption. The application of compensation penalties reflects a punitive orientation that is not only repressive but also restorative, namely to recover state losses as a direct result of corruption. However, in practice, there are still obstacles in the implementation of state loss recovery, including differences in views regarding the amount of state losses, the limited ability of convicts to fulfill their obligation to pay compensation, and the process of tracing and seizing assets resulting from criminal acts, which requires time and coordination between law enforcement agencies. These obstacles have implications for the suboptimal realization of rapid and comprehensive recovery of state losses. Therefore, it is necessary to strengthen asset tracing mechanisms, ensure consistency in the application of additional monetary penalties by judges, and promote more effective synergy between law enforcement officials and state audit institutions to ensure maximum recovery of state losses in corruption cases.

Keywords: Prosecutor, State Losses, Corruption Crimes, Compensation Money.